

2025

A large, stylized illustration in shades of green and yellow. It features a large recycling symbol at the top, wind turbines on a hill, a bicycle, a sun, clouds, and trees. The background is composed of various geometric shapes and patterns in teal, green, and yellow.

LAPORAN KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY REPORT

PT. BPR Dana Multi Guna

Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan	
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan	5
2.1. Kinerja Ekonomi	5
2.2. Kinerja Lingkungan Hidup	9
2.3. Kinerja Sosial	10
2.4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	12
3. Profil Bank	14
4. Penjelasan Direksi	17
5. Tata Kelola Keberlanjutan	25
Umpan Balik	30

Kata Pengantar

Di tahun 2025, BPR Dana Multi Guna telah melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025 sesuai POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. BPR Dana Multi Guna menerapkan program- program kerja yang disusun dalam RAKB sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

BPR (Bank Perekonomian Rakyat) sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyadari pentingnya isu pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip *triple bottom line* yaitu *people* (kesejahteraan masyarakat), *profit* (keuntungan) dan *planet* (lingkungan hidup) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST).

BPR Dana Multi Guna sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat dituntut untuk bisa selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur dengan menghindari pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup, fokus pada usaha debitur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga BPR mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga kredit.

Dalam hal ini BPR Dana Multi Guna berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagai langkah bersama bagi Sektor Jasa Keuangan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut Keberlanjutan Bank sebab ketidakpedulian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial dapat meningkatkan risiko bagi Perbankan khususnya peningkatan risiko kredit akibat kegagalan bayar (*default*) debitur yang memiliki usaha berdampak negatif terhadap lingkungan dan kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Keberlanjutan (SR - *Sustainability Report*) BPR Dana Multi Guna Tahun 2025 ini berisi informasi mengenai kinerja keberlanjutan Bank dalam bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial kepada seluruh pemangku kepentingan. BPR Dana Multi Guna dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar, sebagaimana ketentuan dari OJK untuk pertama kali menyusun Laporan Keberlanjutan di tahun 2025 yaitu Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 dan wajib disampaikan ke OJK secara luring (*offline*) paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan yang berlaku. Dengan demikian BPR Dana Multi Guna menyusun Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 yang memuat informasi untuk periode pelaporan 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Pedoman Teknis Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017.

1.**Pendahuluan dan Penjelasan Strategi Keberlanjutan****Tentang Laporan Keberlanjutan**

Sesuai dengan POJK No. 51/POJK. 03/2017 tanggal 27 Juli 2017, pasal 10 mengenai Keuangan Berkelanjutan, BPR/ BPRS diwajibkan secara substantif menyiapkan serta menyerahkan Laporan Keberlanjutan (LK) paling lambat 30 April setiap tahunnya. Oleh karena itu, BPR/BPRS harus menyusun dan mengirimkan LK atau SR (Sustainability Report) Tahun 2025 kepada OJK paling akhir pada 30 April 2026 sekaligus dengan Laporan Tahunan BPR/BPRS tahun 2025..

Laporan Kinerja Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah dokumen publik yang memuat evaluasi kinerja ekonomi, keuangan, sosial, serta lingkungan hidup suatu LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik guna mendukung pelaksanaan usaha berkelanjutan.

Berikut adalah format penulisan Laporan Keberlanjutan yang tercantum dalam Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan:

1. Rincian Rencana Lanjutan Berkelanjutan
2. Rangkuman Pelaksanaan Faktor Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup)
3. Uraian Ringkas tentang BPR/BPRS
4. Penjelasan dari Direksi
5. Pengelolaan kesinambungan
6. Tingkat kinerja dalam upaya mempertahankan keberlanjutan
7. Tim independen menyusun tinjauan tertulis
8. Catatan buku tanggapan (*masukan*) untuk pembaca dan
9. Jawaban BPR/BPRS terhadap masukan laporan tahun sebelumnya.

Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan BPR Dana Multi Guna tahun 2025 disusun sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017, yang menetapkan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Laporan Keberlanjutan ini tidak terlepas dari laporan tahunan yang telah disusun bersamaan dengan laporan keuangan yang diaudit untuk tahun buku 2025. BPR Dana Multi Guna menyusun serta melaporkan kinerja keberlanjutan dalam periode satu tahun buku (tahunan) yang dimulai pada tahun 2025. Informasi yang dipresentasikan dalam Laporan Keberlanjutan BPR Dana Multi Guna tahun 2025 ini mencakup data dan informasi yang dikumpulkan sepanjang satu tahun, yakni mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2025.

Penetapan konten dalam laporan ini berlandaskan POJK 51/POJK.03/2017 serta didirikan atas

dua prinsip dasar: isi dan kualitas.

Berikut merupakan prinsip-prinsip isi:

1. Laporan Keberlanjutan ini disusun mengikuti kerangka kerja keuangan berkelanjutan. (*Sustainability Report*) yang menampilkan konteks yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan.
2. Kelengkapan: Informasi dipresentasikan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif guna menambah kedalaman pemahaman pembaca.

Standar mutu didasari oleh prinsip-prinsip:

1. Keseimbangan: Data terkait pencapaian, prestasi, dan hambatan disampaikan sesuai kondisi Bank.
2. Komparabilitas: Laporan mencakup data yang disajikan selama periode tiga tahun terakhir.
3. Akurasi: Nilai dan data telah melalui proses verifikasi internal di Bank, sehingga dapat dipastikan keakuratannya.
4. Laporan ini disampaikan tepat waktu bersamaan dengan Laporan Tahunan, menegaskan kepatuhan terhadap jadwal.
5. Kejelasan: Data yang ditampilkan dalam laporan dapat dimengerti tanpa hambatan.

Laporan ini menyoroti isu-isu yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dimasukkan ke dalam dokumen. Prioritas ditetapkan berdasarkan dimensi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak yang diidentifikasi di sini mencakup nilai positif. Penentuan aspek material dan batasan dilakukan dari isu-isu yang memiliki pengaruh signifikan bagi BPR Dana Multi Guna serta seluruh pemangku kepentingannya.

Saat melaksanakan Keuangan Berkelanjutan, BPR merujuk pada delapan prinsip serta tiga prioritas yang diatur dalam POJK No. 51/2017. Delapan prinsip tersebut dirancang oleh BPR Dana Multi Guna:

1. Investasi berkelanjutan adalah strategi yang menilai aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta tata kelola dalam setiap keputusan investasi, dengan tujuan memperkuat pengelolaan risiko. Pendekatan ini mengintegrasikan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola untuk memaksimalkan mitigasi risiko. Kami mengimplementasikan prinsip ini melalui pemberian kredit yang ramah lingkungan, menilai potensi risiko yang mungkin muncul dari proyek yang dibiayai oleh Bank.
2. **Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan;** Kami mengadopsi prinsip ini dengan menanamkannya ke dalam kebijakan keberlanjutan, yang dituangkan dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan). Dokumen tersebut menjadi pijakan bagi BPR Dana Multi Guna dalam melaksanakan bisnis berkelanjutan di semua aktivitas usaha Bank.
3. **Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup ;** Kami telah menerapkan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) dalam menilai risiko di Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Bank. Selain risiko finansial, kami juga mengelola risiko terkait pemberian kredit atau pinjaman yang memiliki dampak langsung pada aspek sosial dan lingkungan hidup, guna memastikan tidak menimbulkan konsekuensi negatif bagi

masyarakat.(*Prudential Banking*)

4. **Prinsip Tata Kelola;** Kami menerapkan tata kelola berkelanjutan dalam dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang didasarkan pada prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*). (*Good Corporate Governance*) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.
5. **Prinsip Komunikasi yang Informatif;** Kami menyajikan laporan informatif yang mencakup strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek Bank, sehingga mudah diakses oleh *parastakeholder* melalui situs web BPR Dana Multi Guna <https://www.bprdmg.com>
6. **Prinsip Inklusif;** Bank berupaya menyediakan produk dan layanan yang terjangkau serta mudah diakses oleh semua nasabah. Bank memastikan akses yang merata dan lancar bagi seluruh masyarakat ke layanan keuangan BPR Dana Multi Guna.
7. **Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas ;** Dalam merancang program keberlanjutan, kami menentukan sektor unggulan prioritas sesuai RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Langkah ini bertujuan memperkuat upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta mendukung program pemerintah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. **Prinsip Koordinasi serta Kolaborasi;** Kami berkomitmen untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga serta pemerintah daerah terkait Bisnis Berkelanjutan, guna menyelaraskan strategi keberlanjutan Bank. Hal ini terlihat melalui keanggotaan kami di Perbarindo dan partisipasi aktif kami dalam mendukung inisiatif yang memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Tetapi, **fokus diarahkan ke RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)**berfokus pada:

1. Penyusunan produk atau layanan keuangan berkelanjutan, meliputi evaluasi serta pemantauan portofolio pembiayaan Bank yang berkontribusi pada pencapaian tujuan keuangan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan memperdalam pemahaman karyawan dan nasabah mengenai keuangan berkelanjutan. *awareness* serta menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan di sektor usaha prioritas Bank.

Strategi Keberlanjutan

Strategi keuangan berkelanjutan dirancang berdasarkan pertimbangan visi serta misi Bank dalam melaksanakan keuangan berkelanjutan. Bagi Bank, penerapan prinsip ini tidak sekadar memenuhi regulasi, melainkan juga menjadi taktik untuk mewujudkan visi Bank, khususnya melalui pelaksanaan inklusi keuangan.

Bank menargetkan segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebagai fokus utama dalam penyediaan layanan keuangan, dengan tujuan memperkecil ketimpangan sosial. Lebih jauh, lewat inovasi produk dan/ atau jasa keuangan yang ramah lingkungan, Bank bertekad memperkuat kontribusinya dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs - *Sustainable Development Goals*) Inisiatif ini tercermin lewat beberapa tindakan, seperti merancang rencana kerja serta menyiapkan RAKB yang mematuhi regulasi yang berlaku.

Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas, BPR Dana Multi Guna mulai menerapkan prinsip-prinsip *go green company* sejak menerapkan Keuangan Berkelanjutan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1. Mengajak seluruh pengguna toilet di kantor BPR untuk mengoptimalkan konsumsi air dengan menempatkan pamflet “Gunakan air seperlunya”, “Hemat air”, atau “Matikan air setelah selesai digunakan”.
2. Mengusung suasana kerja yang lebih sehat melalui kampanye berjudul “BERSIH itu SEHAT”, dengan menempatkan pamflet di lokasi-lokasi strategis yang sering dilihat.
3. Melaksanakan inisiatif “Hemat Energi” dengan membatasi penggunaan AC serta listrik setelah jam kerja dan mematikan lampu di ruang yang tidak sedang dipakai.
4. Implementasi program *tumbler* dalam menggantikan gelas air minum atau botol air kemasan.

2.

Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan

1. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Ekonomi

Perbandingan Target dan Kinerja Keuangan, Portofolio, Pendapatan dan Laba Rugi

Keterangan	2025	2024	2023
Kinerja Keuangan			
Total Aset	31.582.712.040	30.515.278.905	30.742.037.099
Aset Produktif	31.603.095.388	29.970.706.089	30.625.381.273
Kredit/Pembiayaan Bank	22.974.751.111	21.300.354.798	22.854.713.210
Dana Pihak Ketiga	18.631.157.897	18.911.553.432	19.138.017.519
Pendapatan Operasional	8.270.341.833	6.823.929.845	6.443.399.648
Beban Operasional	7.698.295.142	6.377.022.381	5.797.951.259
Laba Bersih	531.812.819	315.236.875	506.367.043
Rasio Kinerja (Dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM)	55,93	52,69	51,74
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	17,41	18,52	13,89
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	17,41	18,52	13,89
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif	0	0	0
NPL gross	23,95	26,09	18,61
NPL nett	19,43	22,56	16,75
Return on Asset (ROA)	1,74	1,17	1,95
Return on Equity (ROE)	7,25	5,23	8,69
Net Interest Margin (NIM)	17,69	13,41	14,50
Rasio Efisiensi (BOPO)	93,08	93,45	89,98
Loan to Deposit Ratio (LDR)	123,31	112,63	119,42
Cash Ratio	19,91	11,97	12,21

Profitabilitas menunjukkan fluktuasi, meningkat pada awal tahun namun mengalami sedikit penurunan di akhir 2024. Meskipun pendapatan operasional mengalami kenaikan, beban tumbuh lebih cepat sehingga laba bersih, ROA, dan ROE turut menurun secara signifikan.

Modal relatif mengalami peningkatan yang signifikan. KPMM tersebut mengalami peningkatan, sehingga berfungsi sebagai bantalan modal untuk menahan kerugian.

Efisiensi mengalami sedikit penurunan, sementara BOPO meningkat, menandakan perlunya perampingan pengendalian biaya.

Meskipun LDR meningkat; DPK sedikit turun-manajemen harus aktif merencanakan likuiditas.

Kinerja Aspek Ekonomi terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	20.619.421.384	18.631.157.897	18.911.553.432	-
a.1. DPK	20.619.421.384	18.631.157.897	18.911.553.432	-
a.2. Surat Berharga	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	50.000.000	15.000.000	15.000.000	-
b.1. Kredit / Pembiayaan	50.000.000	15.000.000	15.000.000	-
b.2. Surat Berharga	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Outstanding produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Dalam Satuan Rupiah Penuh)				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	50.000.000	15.000.000	15.000.000	-
a.1. DPK	50.000.000	15.000.000	15.000.000	-
a.2. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	50.000.000	15.000.000	15.000.000	-
b.1. Kredit / Pembiayaan	50.000.000	15.000.000	15.000.000	-
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Total Outstanding DPK (Rp)	20.619.421.384	18.631.157.897	18.911.553.432	-
Total Nominal Surat Berharga yang diterbitkan (Rp)	-	-	-	-
Total Outstanding Kredit Kepada Pihak Ketiga (Rp)	21.821.296.409	22.974.751.111	21.300.354.798	-

Total Nominal Surat Berharga yang dimiliki (Rp)	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Persentase Total Portofolio Kegiatan Usaha Berkelanjutan terhadap Total Portofolio (%)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan				
a.1. DPK	0,24%	0,08%	0,08%	-
a.2. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan (Kredit)				
b.1. Kredit / Pembiayaan	0,23%	0,07%	0,07%	-
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-

Total outstanding kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	50.000.000	15.000.000	15.000.000	-

Total outstanding kredit/ pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (total a - l)	50.000.000	15.000.000	15.000.000	-
---	------------	------------	------------	---

Pengumpulan dana akan dilaksanakan pada 2025 sebagai bagian dari penerapan Keuangan Berkelanjutan, kemudian didistribusikan ke penyaluran kredit modal kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta modal kerja untuk industri pengolahan limbah. BPR berperan secara aktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan, berlandaskan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Untuk menggerakkan kegiatan tersebut, BPR akan menyisihkan dana sebesar Rp 50 juta dan tenaga marketing. Selain menyalurkan kredit, BPR juga akan melaksanakan program literasi dan edukasi bagi UMKM lokal mengenai manfaat jangka panjang serta cara menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan inklusif sosial.



2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Lingkungan Hidup

Kegiatan Internal dan Kegiatan TJSL

BPR Dana Multi Guna berupaya menciptakan operasional bank yang ramah lingkungan melalui penerapan kebijakan yang selaras dengan prinsip 3R (**Reduce, Reuse, Recycle**) . Sosialisasi prinsip-prinsip ini terus dilaksanakan agar visi awal perusahaan dapat terwujud. Praktik kantor yang berkelanjutan diwujudkan melalui pengelolaan bahan baku/ material, energi, dan air yang lebih efisien. Akibatnya, sepanjang tahun laporan, operasional BPR Dana Multi Guna tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati di sekitarnya.

Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

Perusahaan juga mengimplementasikan penggunaan bahan ramah lingkungan, termasuk mengganti gelas plastik dengan *tumbler* yang dipersiapkan oleh masing-masing pegawai.

Penggunaan Energi (antara lain Air dan Listrik)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penggunaan Bahan Bakar (Liter)	1.500	2.069	1.412	1.865
b. Penggunaan Listrik (kWh)	20.000	20.526	20.723	16.921
c. Penggunaan Air (m3)	800	1.127	903	825
d. Penggunaan Kertas (kg)	400	373	524	484

Total Emisi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Scope 1 (Ton CO2)	-	-	-	-
b. Scope 2 (Ton CO2)	-	-	-	-
c. Scope 3 (Ton CO2)	-	-	-	-
c.1. Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
c.2. Non-Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
d. Pengurangan Emisi (Ton CO2)	-	-	-	-
Total Emisi Scope 1,2,3 (Ton CO2)	-	-	-	-
Total Limbah Dibuang (Ton CO2)	-	-	-	-
Kegiatan Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Satuan Rupiah)	-	-	-	-

3. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan, Kinerja Sosial dan Keuangan Inklusi

Komitmen Perusahaan dan Kinerja Keuangan Inklusi

BPR menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas keuangan melalui upaya menyediakan layanan yang setara, transparan, dan mudah diakses bagi semua konsumen. Dengan menyampaikan informasi produk secara akurat, perusahaan tidak hanya memperkuat kepercayaan, namun juga mendorong literasi keuangan masyarakat. Akibatnya, kinerja keuangan menjadi lebih stabil, reputasi meningkat, dan kontribusi sosial terhadap pembangunan ekonomi semakin nyata. BPR juga memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan menetapkan pengupahan/penggajian sesuai standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di Kabupaten Bekasi sebagai langkah untuk meningkatkan keberlanjutan keuangan BPR.

Penggunaan komunikasi antara BPR dan nasabah sebagai bagian layanan pemberian informasi dilakukan melalui SMS pengingat pembayaran kredit serta aplikasi sederhana yang menampilkan saldo tabungan atau kredit nasabah. Oleh karena itu, saat ini BPR belum menjalin kerjasama dengan pihak manapun yang memanfaatkan keahlian luar.

Perkembangan Laku Pandai

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Jumlah Agen Laku Pandai	-	-	-	-
b. Jumlah Kepemilikan Rekening Tabungan (Basic Saving Account)	-	-	-	-
c. Jumlah Kepemilikan Rekening Kredit yang melalui referral Agen Laku Pandai	-	-	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

Perusahaan bertekad menjaga kesetaraan kesempatan kerja tanpa diskriminasi gender, usia, atau latar belakang, serta menjauhi praktik tenaga kerja paksa dan kerja anak. Gaji karyawan di tingkat terendah telah disesuaikan dengan upah minimum regional, dengan persentase yang mematuhi ketentuan pemerintah. Lingkungan kerja dijamin layak dan aman melalui penerapan standar keselamatan kerja, kesehatan, serta fasilitas pendukung yang memadai bagi semua pekerja. Selain itu, perusahaan secara konsisten mengadakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan pegawai, baik teknis maupun non-teknis, guna meningkatkan kompetensi dan mendukung prinsip Keuangan Berkelanjutan. Inisiatif ini mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif, sejahtera, dan berdaya saing, sekaligus mendukung keberlanjutan operasional jangka panjang.

Kinerja Aspek Sosial Terkait Inklusivitas Ketenagakerjaan Internal Bank

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Pegawai Bank	24	24	24	24
Jumlah Direksi dan Komisaris (Total Jumlah Pria dan Wanita)	4	4	4	4
Jumlah Direksi dan Komisaris Pria	2	2	2	2
Jumlah Direksi dan Komisaris Wanita	2	2	2	2
Jumlah Pegawai Difable	-	-	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Masyarakat

Kinerja sosial perusahaan kepada masyarakat menunjukkan komitmen perusahaan dalam menumbuhkan dampak positif sekaligus mengelola potensi dampak negatif yang timbul dari operasionalnya. Berbagai inisiatif telah dilaksanakan, termasuk program literasi keuangan, pelatihan UMKM, dan bantuan pada kegiatan sosial serta pendidikan. Dampak positifnya berupa peningkatan kapasitas masyarakat, terciptanya peluang usaha baru, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan keuangan. Namun, di sisi lain, muncul juga dampak negatif, seperti ketidakpuasan sebagian masyarakat atas keterbatasan akses program atau persepsi ketidakmerataan manfaat.

Agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi, perusahaan menyiapkan saluran pengaduan lewat jalur resmi, baik tatap muka maupun digital. Semua pengaduan dicatat, diverifikasi, dan ditindak sesuai prosedur. Selama periode pelaporan, sejumlah pengaduan diterima, dan sebagian besar berhasil diselesaikan melalui mediasi serta tindak lanjut yang transparan.

Perusahaan juga aktif melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), termasuk bantuan pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Program TJSL ini tidak semata-mata untuk mematuhi regulasi, melainkan juga bertujuan menciptakan nilai berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, kinerja sosial perusahaan menjadi elemen penting dalam membangun hubungan harmonis dan berkelanjutan dengan masyarakat.

Kinerja Aspek Sosial Terkait Dana Kegiatan Sosial Serta Keanggotaan Pada Asosiasi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Realisasi Dana Untuk Kegiatan Sosial (Satuan Rupiah)	50.000.000	15.000.000	-	-
Jumlah Keanggotaan pada Asosiasi	-	-	-	-

4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebagai entitas bisnis, BPR Dana Multi Guna berusaha terus meningkatkan eksistensinya, salah satunya melalui inovasi dan pengembangan produk serta layanan yang memperhatikan perkembangan teknologi terkini. Teknologi ini menjadi faktor kunci dalam pergeseran perilaku masyarakat modern, yang menginginkan kemudahan, rasa aman, dan kenyamanan dalam bertransaksi perbankan.

BPR Dana Multi Guna melakukan inovasi dengan prinsip kehati-hatian sesuai kebijakan perusahaan. Selama tahun 2025, BPR Dana Multi Guna meluncurkan Program Kredit BPR Dana Multi Guna dan produk tabungan sebagai bagian dari inovasi dan pengembangan produk/jasa yang telah dilakukan.

Selain itu, BPR Dana Multi Guna turut menyusun program *Credit Scoring* untuk Aplikasi Monitoring Kredit yang bekerjasama dengan vendor tertentu, sekaligus Laporan Tahunan berbasis web.

Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan

Semua produk dan jasa yang ditawarkan BPR Dana Multi Guna telah memenuhi semua persyaratan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga keamanan bagi nasabah sudah teruji. Selanjutnya, untuk meminimalkan risiko kerugian yang mungkin timbul, BPR Dana Multi Guna terus menyampaikan informasi mengenai semua risiko potensial kepada nasabah, termasuk risiko pasar. Informasi tersebut disampaikan melalui berbagai saluran, seperti formulir Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) melalui SMS dan aplikasi sederhana, maupun secara tatap muka.

Sejalan dengan hal tersebut, BPR Dana Multi Guna melaksanakan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara rutin, sehingga calon maupun nasabah memahami dengan benar produk/ jasa yang ditawarkan oleh Perseroan. Akibatnya, mereka akan berinvestasi sesuai kebutuhan dan sudah mengetahui profil risiko yang melekat pada produk/jasa tersebut.

Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR Dana Multi Guna akan menyediakan dana sesuai prinsip keuangan berkelanjutan dan merujuk pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, sambil menjaga prinsip kehati-hatian, termasuk upaya mencegah risiko serta dampak negatif yang mungkin timbul. Hasilnya adalah tidak ada dampak negatif terhadap produk dan jasa yang disediakan BPR Dana Multi Guna pada tahun pelaporan.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal BPR Dana Multi Guna maupun perintah dari regulator (OJK).

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR Dana Multi Guna belum melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, namun di sepanjang tahun 2024 tidak ada komplain dari nasabah atau masyarakat terhadap produk dan jasa Bank yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

3.

Profil Bank

Informasi Umum Perusahaan	
Nama Perusahaan	PT BPR DANA MULTI GUNA
Alamat	Jl KH Dewantara No 63, Cikarang Utara, Kab. Bekasi
Nomor Telepon	021-8201415
Email	customer-service@bprdmg.com
Website	www.bprdmg.com

Skala Usaha Bank

BPR Dana Multi Guna yang pada saat ini berada pada kondisi dengan modal inti yang memiliki Rp 7 miliar lebih, serta aset yang berjumlah mencapai Rp 31 miliar. Modal inti tersebut sesuai dengan klasifikasi dari OJK bahwa BPR tersebut dikategorikan dengan BPR yang kecil. Skala usaha yang dijalankan masih terbatas, namun sudah menunjukkan adanya pertumbuhan aset yang signifikan dibandingkan modal inti.

Meski masih kecil, namun BPR dengan aset lebih dari Rp 31 miliar memiliki peluang untuk :

- meningkatkan basis nasabah hingga 3.000 orang dalam 3 tahun.
- memperluas portofolio kredit ke sektor industri kecil-menengah di Bekasi.
- digitalisasi layanan untuk menekan biaya operasional dan menjangkau nasabah lebih luas.

BPR dengan modal inti dan aset yang telah diperoleh sehingga menunjukkan bisnis BPR dengan skala usahan kecil, dengan fokus pelayanan lokal di kabupaten Bekasi, dengan usaha yang dijalankan meliputi penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit mikro dan konsumtif serta layanan tabungan dan deposito sederhana. Meski terbatas, BPR sudah dapat menunjukkan kemampuan operasional yang sehat dan memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang.

Produk dan Layanan

Penghimpunana dana masyarakat dengan total dana pihak ketiga sekitar 20 sampai 25 miliar rupiah melalui tabungan dan deposito , Penyaluran kredit dengan portofolio kredit UMKM dan konsumtif sekitar 20-25 miliar rupiah dengan fokus pada sektor perdagangan, jasa dan konsumsi rumah tangga. Dengan jaringan kantor pada saat ini memiliki 1 (satu) kantor. Layanan digital yang masih terbatas dengan hanya SMS banking dan aplikasi untuk cek saldo nasabah.

Profil Singkat dan Nilai Keberlanjutan Bank

a. Visi Keberlanjutan

Visi : menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang tumbuh dengan sehat, aman, terpercaya dan bermanfaat

b. Misi Keberlanjutan

Misi :

1. memberikan pelayanan jasa keuangandengan menyediakan produk jasa yang baik, dengan harga yang wajar, kejujuran yang penuh, integritas, beretika di segala aspek bisnis.
2. membangun sebuah lingkungan kerja yang aman dan memberikan pemenuhan serta kesempatan untuk tumbuh dan belajar bagi seluruh karyawan.
3. menjadi warga dunia perbankan Indonesia yang baik, selaras dengan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

c. Nilai Keberlanjutan dan Budaya Bank

Nilai Keberlanjutan

Keberlanjutan dalam dunia perbankan bukan sekadar tren, melainkan fondasi strategis yang memastikan bank tetap relevan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, serta tata kelola (*Environmental, Social, and Governance* atau ESG).

Nilai keberlanjutan mencakup:

- Integrasi ESG dalam keputusan bisnis: setiap pembiayaan dan investasi mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.
- Efisiensi operasional hijau: penerapan teknologi ramah lingkungan, pengurangan penggunaan kertas, serta optimalisasi energi.
- Pemberdayaan masyarakat: mendukung literasi keuangan, inklusi keuangan, dan program sosial yang meningkatkan kesejahteraan.
- Transparansi dan akuntabilitas: laporan keberlanjutan yang jelas, sesuai regulasi, menjadi bukti komitmen bank terhadap publik.

Budaya Bank

Budaya bank adalah jiwa organisasi yang membentuk perilaku, etika, dan cara kerja seluruh insan bank. Budaya ini biasanya dibangun di atas nilai inti seperti:

- **Integritas:** menjaga kepercayaan nasabah dengan layanan yang jujur dan transparan.
- **Profesionalisme :** mengutamakan kualitas kerja, kepatuhan terhadap regulasi, dan kompetensi sumber daya manusia.
- **Kolaborasi:** mendorong kerja sama antarunit, serta kemitraan dengan masyarakat dan regulator.
- **Inovasi :** adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah, tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.
- **Orientasi pada nasabah:** menempatkan kepuasan dan keberhasilan nasabah sebagai prioritas utama.

Harmoni Nilai Keberlanjutan dan Budaya Bank

Ketika nilai keberlanjutan menyatu dengan budaya bank, tercipta organisasi yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Bank menjadi agen perubahan yang:

Menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif dan ramah lingkungan.

Menumbuhkan budaya kerja yang peduli, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.

Menjadi teladan dalam tata kelola yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberlanjutan bukan hanya strategi bisnis, melainkan bagian dari DNA budaya bank yang membentuk reputasi, kepercayaan, dan keberlangsungan jangka panjang.

4.

Penjelasan Direksi

Penjelasan Direksi

Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Bank bertekad menegakkan nilai keberlanjutan dengan menjadi lembaga keuangan yang dapat diandalkan dan berprestasi dalam berkontribusi kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals*. Pengimplementasian nilai keberlanjutan ini dilakukan lewat strategi inti yang menekankan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM sesuai kebutuhan strategis, integrasi faktor sosial dan lingkungan ke dalam manajemen risiko, serta pertumbuhan portofolio kredit atau pembiayaan untuk aktivitas usaha berkelanjutan, khususnya sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sektor UMKM adalah aktivitas produktif yang dijalankan oleh individu atau entitas bisnis yang memenuhi kriteria khusus, dan memainkan peranan vital dalam ekonomi Indonesia dengan khususnya mempekerjakan tenaga kerja demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), BPR merancang RAKB (Rencana Aksi Keuangan

Berkelanjutan) dengan jangka waktu lima tahun sebagai Rencana Aksi jangka panjang. Selain itu, Bank juga menyusun Rencana Aksi jangka pendek satu tahun yang diberlakukan pada tahun 2025.

Target yang ditetapkan oleh Bank adalah pegawai telah mengikuti sosialisasi penerapan Keuangan Berkelanjutan dan sudah mengimplementasikan operasional Perbankan Hijau (*green banking*).

Laporan Keberlanjutan ini menyajikan komitmen, strategi, dan pencapaian kinerja kami dalam bidang Keuangan Berkelanjutan. Berikut adalah komitmen kami:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional bank (*prudential banking*) merupakan landasan utama dalam melaksanakan fungsi serta aktivitas usaha, khususnya saat memberikan kredit.
2. Meningkatkan efisiensi operasional bank sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
3. Peningkatan kompetensi staf dalam memahami aspek sosial dan lingkungan hidup serta aplikasinya di setiap kegiatan usaha Bank.
4. Melaksanakan perbankan yang inklusif melalui menyediakan akses keuangan bagi semua lapisan masyarakat.
5. Berperan aktif dalam upaya bersama guna memperkaya kesejahteraan masyarakat.

Strategi Pencapaian Target

Bank terus menyesuaikan strategi keberlanjutan, khususnya dalam mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Saat menerapkan keuangan berkelanjutan, BPR tidak lepas dari berbagai risiko, termasuk risiko di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, bank telah mengelola risiko tersebut secara optimal melalui serangkaian upaya mitigasi.

Saat memulai penempatan pondasi batu pertama keuangan berkelanjutan, tantangan utama yang dihadapi adalah komunikasi dan upaya membuat semua pemangku kepentingan menyadari pentingnya penerapan keuangan berkelanjutan dalam operasi serta bisnis perusahaan. Meski begitu, kami yakin bahwa masa depan akan menyuguhkan peluang penyaluran dana yang signifikan terkait Keuangan Berkelanjutan.

Pada tahun 2025, BPR Dana Multi Guna berupaya meningkatkan kualitas layanan keuangan berkelanjutan. Kami mengharapkan sinergi dan kerja sama dengan pemerintah, regulator, dan asosiasi untuk menambah nilai bagi ekonomi, lingkungan, serta sosial demi mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BPR Dana Multi Guna ke depan, kami akan terus fokus pada penerapan keuangan berkelanjutan. Rencana kami meliputi peningkatan pemahaman semua level organisasi tentang keuangan berkelanjutan, membentuk budaya kerja yang mendukung lingkungan dan sosial dalam kegiatan sehari-hari, merancang produk keuangan berkelanjutan, serta memperbesar

portofolio produk berkelanjutan kami.

Mewujudkan keuangan berkelanjutan memerlukan keselarasan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta permasalahan lingkungan lainnya yang menjadi tanggung jawab bersama. Kami berkomitmen berkontribusi dalam menurunkan dampak negatif lingkungan dan sosial yang timbul dari aktivitas operasional dan bisnis kami.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Internal

1. Fokus Bisnis Bank

Kendala yang muncul saat mengimplementasikan **keuangan berkelanjutan** di BPR Dana Multi Guna seringkali terkait dengan kemampuan internal organisasi untuk beralih dari fokus laba sekunder menjadi pertumbuhan yang lebih menyeluruh, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Triple bottom line).

2. Operasional Bank

Dari perspektif operasional BPR Dana Multi Guna, tantangan utama penerapan keuangan berkelanjutan adalah bagaimana prinsip ESG (*Environmental, Social and Governance*) atau LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) disisipkan dalam operasional harian. Ini meliputi semua fase, mulai dari proses kredit, layanan nasabah, sampai pelaporan. Sering kali, terjadi selisih besar antara kebijakan tertulis dan realisasinya di lapangan.

3. Kebijakan Internal

BPR Dana Multi Guna belum sepenuhnya menetapkan pedoman internal yang jelas dan komprehensif untuk menanamkan unsur keberlanjutan ke dalam Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, maupun Kebijakan Penerapan Tata Kelola.

4. Keahlian SDM Bank

1. BPR Dana Multi Guna menyadari bahwa belum ada SDM yang ditugaskan sebagai spesialis ESG (*Environmental, Social and Governance*) atau *Sustainability Officer*. Fungsi ini biasanya dirangkap oleh Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang juga memiliki beban kerja besar dan perangkapan jabatan.
2. Kemampuan identifikasi risiko lingkungan dan sosial. Analis kredit umumnya dilatih untuk membaca laporan keuangan dan arus kas, namun belum terbiasa menilai potensi pencemaran, keselamatan kerja, konflik sosial, atau kepatuhan usaha terhadap regulasi lingkungan hidup.

5. Lainnya

Tantangan lainnya yang tidak kalah beratnya adalah profil dan kesiapan debitur. Mayoritas nasabah BPR berasal dari segmen mikro dan kecil yang umumnya belum memiliki kesadaran atau kemampuan untuk menerapkan praktik usaha ramah lingkungan. Banyak usaha masih informal, sehingga sulit menyediakan dokumen legalitas, izin lingkungan, atau bukti pengelolaan limbah.

Upaya yang dilakukan

Bagi BPR Dana Multi Guna menyadari bahwa penerapan keuangan berkelanjutan bukan sekedar memenuhi POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan, tetapi bagaimana membuat prinsip tersebut realistis dijalankan dengan kapasitas Bank yang relatif terbatas.

Karena itu, upaya yang dicoba dilakukan yaitu bersifat bertahap, praktis, dan menyesuaikan profil nasabah UMKM. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan komitmen manajemen**

Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan arah strategis melalui kebijakan, rencana aksi, serta penyediaan sumber daya. *Tone from the top* (sikap, tindakan, dan perilaku etis dari pemimpin tertinggi organisasi dewan direksi, manajemen senior) penting agar seluruh unit memahami bahwa keberlanjutan adalah bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar proyek tambahan

2. **Penyusunan kebijakan dan prosedur yang sederhana**

BPR menerjemahkan prinsip ESG ke dalam panduan praktis, misalnya daftar sektor yang dibatasi, klasifikasi risiko rendah–tinggi, serta *checklist* singkat bagi account officer. Pendekatan ini membuat implementasi lebih mudah diterapkan.

3. **Peningkatan kapasitas SDM**

Dilakukan melalui pelatihan rutin, workshop studi kasus UMKM, serta pembekalan cara identifikasi risiko lingkungan dan sosial yang relevan dengan kondisi lapangan.

4. **Integrasi ke proses kredit**

Aspek keberlanjutan mulai dimasukkan dalam tahap analisis, persetujuan, hingga monitoring. Tidak harus rumit, tetapi cukup memastikan adanya pertimbangan dampak lingkungan dan sosial.

5. **Pengembangan produk dan insentif**

Misalnya pemberian suku bunga atau persyaratan yang lebih baik bagi usaha yang menjalankan praktik ramah lingkungan, pengelolaan limbah, atau efisiensi energi.

6. **Peningkatan kualitas data dan pelaporan**

Walaupun sistem IT terbatas, BPR dapat memulai dengan *template* manual atau penandaan portofolio untuk memudahkan kompilasi data secara bertahap.

7. **Edukasi dan pendampingan nasabah**

Karena banyak debitur belum memahami isu keberlanjutan, bank dapat memberikan sosialisasi ringan mengenai manfaat praktik usaha yang lebih bertanggung jawab.

8. Kerja sama dengan pihak eksternal

BPR dapat menggandeng dinas pemerintah, komunitas UMKM, atau lembaga pendamping guna membantu penilaian maupun pembinaan debitur.

9. Implementasi bertahap berbasis prioritas

Implementasi Keuangan Berkelanjutan pada BPR Dana Multi Guna tidak harus langsung sempurna. Fokus dapat dimulai dari sektor dengan risiko tinggi atau peluang hijau yang paling memungkinkan di wilayah kerja.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Eksternal**1. Kebijakan Pemerintah**

Dari sisi eksternal, khususnya yang bersumber dari **kebijakan dan lingkungan regulasi pemerintah dan regulator**, BPR Dana Multi Guna sering menghadapi dinamika yang tidak sederhana dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Walaupun arah kebijakan nasional mendorong praktik ESG, penerjemahannya pada bank berskala kecil seperti BPR membutuhkan penyesuaian yang cukup besar.

Beberapa tantangan yang umum dirasakan antara lain :

1. Perubahan dan perkembangan regulasi yang cepat.

Ketentuan mengenai keuangan berkelanjutan, pelaporan, maupun klasifikasi kegiatan hijau terus berkembang. BPR perlu waktu untuk memahami, menafsirkan, dan menyesuaikan proses internalnya.

2. Kebutuhan pelaporan yang semakin detail.

Permintaan data portofolio berkelanjutan sering memerlukan pemetaan sektor dan informasi debitur yang belum tentu tersedia. Bagi BPR dengan infrastruktur terbatas, ini menjadi beban tambahan.

3. Standar yang cenderung mengacu pada praktik bank umum.

Sebagian pedoman dirancang dengan asumsi kapasitas bank besar, sehingga implementasinya pada BPR memerlukan penyederhanaan atau interpretasi khusus.

2. Perekonomian Nasional, Regional, dan Global

Secara garis Besar BPR Dana Multi Guna menghadapi tantangan secara eksternal dan jika dipetakan menjadi hal-hal sebagai berikut sesuai pada gambaran pada masing-masing level di bawah ini.

Tingkat Nasional

Di tingkat nasional, isu utama biasanya berkaitan dengan struktur ekonomi dan kesiapan pelaku usaha.

Pertama, **ketergantungan pada sektor tertentu** yang belum sepenuhnya ramah lingkungan.

Peralihan menuju praktik yang lebih hijau membutuhkan biaya dan waktu, sehingga permintaan pembiayaan berkelanjutan belum tumbuh cepat.

Kedua, **kesenjangan literasi dan kapasitas UMKM**. Sebagian besar pelaku usaha masih fokus pada keberlangsungan bisnis jangka pendek sehingga investasi pada teknologi atau proses yang lebih berkelanjutan belum menjadi prioritas.

Tingkat Regional (daerah/wilayah)

Pada level regional, variasi kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur sangat memengaruhi.

Banyak daerah menghadapi **keterbatasan akses teknologi hijau**, minimnya konsultan atau lembaga pendukung, serta belum berkembangnya rantai pasok yang berkelanjutan.

Selain itu, **prioritas pembangunan daerah** sering masih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja cepat, sehingga aspek lingkungan belum selalu menjadi pertimbangan utama.

Kualitas data dan pengawasan lingkungan antar daerah juga bisa berbeda, menyulitkan lembaga keuangan untuk melakukan penilaian yang seragam.

Tingkat Global

Di tingkat global, tekanan datang dari perubahan standar, pasar, dan risiko lintas negara.

Ada **peningkatan tuntutan terhadap transparansi dan standar ESG internasional**, yang terus berkembang dan memerlukan penyesuaian.

Fluktuasi ekonomi dunia, perubahan harga komoditas, dan risiko perubahan iklim menimbulkan **ketidakpastian investasi**.

Selain itu, muncul risiko **akses pendanaan internasional** yang semakin mensyaratkan kepatuhan pada prinsip keberlanjutan tertentu.

Secara keseluruhan, tantangan pada tiga level ini saling terkait. Kondisi global memengaruhi kebijakan nasional, lalu diterjemahkan secara berbeda di tiap daerah. Lembaga keuangan, termasuk BPR, berada di tengah dinamika tersebut.

3. Lainnya

1. **Ciri khas dan kematangan nasabah.** Sebagian besar debitur BPR datang dari kalangan usaha mikro dan kecil yang pemahaman lingkungannya masih terbatas. Banyak bisnis yang belum berizin, belum memiliki standar pengelolaan limbah, atau praktik kerja yang\terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyulitkan bank dalam mengumpulkan informasi untuk mengevaluasi aspek keberlanjutan.
2. **Pandangan dan penolakan dari pihak peminjam.** Persyaratan tambahan atau pertanyaan terkait pengaruh terhadap lingkungan dapat dianggap sebagai penghalang dalam mendapatkan pinjaman. Apabila tidak diatasi dengan tepat, hal ini berpotensi mengurangi ketertarikan calon debitur.

Upaya yang dilakukan

Untuk menghadapi tantangan eksternal dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR Go digital menempuh langkah seperti meningkatkan komunikasi dengan regulator, mengikuti forum industri/perbarindo, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dengan pendekatan yang paling realistis sesuai kapasitas.

Berikut beberapa upaya yang lazim ditempuh oleh BPR Dana Multi Guna antara lain:

1. **Edukasi dan literasi kepada nasabah.**
BPR dapat melakukan sosialisasi sederhana mengenai praktik usaha yang lebih aman bagi lingkungan, manfaat legalitas, serta potensi efisiensi biaya. Pendekatan persuasif ini membantu mengurangi resistensi ketika bank mulai menanyakan aspek ESG.
2. **Pendampingan UMKM.**
Tidak cukup hanya meminta dokumen; bank membantu debitur memahami apa yang perlu diperbaiki. Misalnya arahan pengelolaan limbah sederhana, keselamatan kerja, atau cara memperoleh izin usaha.
3. **Membangun kemitraan lokal.**
Kerja sama dengan dinas pemerintah daerah, koperasi, komunitas UMKM, atau lembaga pendamping dapat membantu penyediaan informasi teknis dan pembinaan tanpa seluruh beban ada pada bank.
4. **Mengembangkan produk yang realistis dengan pasar.**
Daripada menunggu proyek hijau besar, BPR dapat mendorong pembiayaan yang berdampak sederhana namun nyata, seperti pembiayaan terhadap Kegiatan UMKM, efisiensi energi, pertanian ramah lingkungan, atau pengurangan limbah.
5. **Peningkatan komunikasi dengan regulator.**
Melalui forum industri atau asosiasi, BPR dapat memperoleh klarifikasi, berbagi praktik baik, serta menyampaikan kendala lapangan sehingga implementasi lebih sesuai dengan kapasitas.

6. Penyederhanaan persyaratan.

Agar tidak menghambat minat debitur, bank dapat menggunakan checklist atau klasifikasi risiko yang proporsional terhadap skala usaha.

7. Penguatan reputasi dan komunikasi publik.

Dengan menunjukkan komitmen pada pembiayaan yang bertanggung jawab, bank dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menarik nasabah yang sejalan.

5.

Tata Kelola Keberlanjutan

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Tata Kelola yang Baik (GCG - *Good Corporate Governance*) bagi Bank merupakan suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan 5 (lima) Pilar Tata Kelola, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Selain itu, GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika perbankan.

Struktur tata kelola perusahaan BPR Dana Multi Guna adalah sebagai berikut:

1. RUPS: adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris; adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.

Dalam penerapan *good corporate governance*, Perseroan telah memiliki kerangka kerja (*frame work*) yang menggabungkan tiga hal yaitu Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*) dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Kerangka kerja dan operasional ini diharapkan mampu memberikan hasil berupa perwujudan ekspektasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan.

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Selain itu, Dewan Komisaris berwenang memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi, meminta serta menelaah laporan terkait kegiatan Perseroan, menandatangani, dan mengesahkan laporan tahunan. Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi terhadap hasil audit serta menyampaikan pandangan mengenai penerapan manajemen risiko.

Dalam kaitannya dengan pemegang saham, Dewan Komisaris berperan menjaga kepentingan

mereka dengan memberikan masukan atas isu-isu penting yang dihadapi perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melalui proses uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan mengusulkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada Dewan Komisaris.
3. Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) kepada Dewan Komisaris.
4. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
5. Direksi bertanggung jawab memastikan perusahaan senantiasa patuh terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku, sekaligus menjaga kepentingan para pemegang saham.
6. Direksi mengatur kegiatan operasional harian, menyusun serta menjalankan strategi bisnis, dan menyampaikan laporan kinerja maupun hasil pencapaian kepada Dewan Komisaris.
7. Dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan, Direksi memperoleh dukungan dari Pejabat Eksekutif yang memberikan masukan serta rekomendasi terkait kebijakan perusahaan.

Sebagai BPR (Bank Perekonomian Rakyat) yang memiliki modal inti di bawah Rp 50 milyar, BPR Dana Multi Guna berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Penerapan keuangan berkelanjutan di BPR Dana Multi Guna secara umum menjadi tanggung jawab Direktur Utama sebagai pemimpin tertinggi di BPR Dana Multi Guna. Namun, dalam pelaksanaannya, Direktur Utama telah menugaskan Direktur Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan yang membawahi Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang bertugas melakukan monitoring, dan penyampaian atas penerapan keuangan berkelanjutan.

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Unit Kerja yang menangani Keuangan Berkelanjutan dan Pengendalian Risiko Iklim	1	-	-
Jumlah SPO Manajemen Risiko terkait Keuangan Berkelanjutan	1	-	-

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan**Program Pengembangan Bagi Internal Bank Pada Setiap Level Jabatan**

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Dewan Komisaris	1	-	-
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Direksi	1	-	-
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pejabat Eksekutif	1	-	-
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pegawai	1	-	-

Pengembangan kompetensi ditujukan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, pejabat, serta unit kerja yang bertanggung jawab atas penerapan keuangan berkelanjutan. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan melalui partisipasi SDM dalam program pelatihan, sertifikasi profesional, maupun kegiatan sosialisasi terkait regulasi yang berlaku.

Pembekalan dilakukan melalui pemberian pelatihan yang dilakukan dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim. Materi yang disampaikan mencakup prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan kategori kegiatan yang tergolong sebagai KUB. Dengan demikian, Bank berharap dapat mengembangkan portofolio produk yang termasuk dalam kategori KUB di masa mendatang.

1. Sosialisasi Keuangan Berkelanjutan Tahap 1 sesuai POJK No. 51 yang dilakukan oleh Bagian Kepatuhan kepada seluruh SDM pada tanggal 6 Februari 2025.
2. Sosialisasi program kerja implementasi keuangan berkelanjutan kepada seluruh SDM pada tanggal 7 Maret 2025.



Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Pada tahun 2025, fokus program keuangan berkelanjutan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah melalui fasilitas kredit tanpa agunan bagi pelaku usaha mikro. Karena sifat program ini, pengelolaan risiko menjadi bagian integral dari manajemen risiko kredit.

BPR menerapkan mekanisme yang sistematis untuk mengenali, menilai, memantau, dan mengendalikan potensi risiko yang timbul dari penyaluran kredit dalam kerangka keuangan berkelanjutan. Selain itu, dilakukan pengawasan terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mungkin memengaruhi kualitas kredit dan stabilitas perusahaan.

Keterlibatan dan Penjelasan Terkait Pemangku Kepentingan

Pemegang Saham

Dalam penerapan **keuangan berkelanjutan**, peran pemegang saham di BPR Dana Multi Guna menentu arah strategis BPR melalui kewenangan dalam RUPS, penetapan target kinerja, Tingkat komitmen pemegang saham BPR yang tinggi mendorong BPR Dana Multi Guna untuk lebih disiplin melaksanakan Keuangan Berkelanjutan.

Pemerintah

Peran pemerintah dalam penerapan **keuangan berkelanjutan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR)** penting karena pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan, regulator, sekaligus penggerak ekosistem pembangunan ekonomi. Melalui peran ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan BPR Dana Multi Guna menerapkan prinsip keberlanjutan secara efektif tanpa mengabaikan kelangsungan usaha dan prinsip kehati-hatian.

Otoritas

OJK menerbitkan panduan teknis, contoh praktik, serta klasifikasi kegiatan usaha yang mendukung keberlanjutan. Materi ini membantu BPR Dana Multi Guna menerjemahkan konsep ESG ke dalam prosedur operasional sehari-hari.

Praktisi

BPR Dana Multi Guna juga melakukan *sharing experience* dengan praktisi perbankan yang lebih awal dan berpengalaman dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan. Diharapkan Pengalaman dari bank atau lembaga lain membantu BPR Dana Multi Guna memahami pendekatan yang sudah terbukti berhasil, termasuk cara sederhana mengintegrasikan ESG tanpa membebani operasional.

Pegawai

Dalam penerapan **keuangan berkelanjutan** di BPR Dana Multi Guna, pegawai merupakan pelaku utama yang menentukan apakah kebijakan dapat berjalan atau hanya menjadi dokumen. Direksi dapat menetapkan strategi, namun pelaksanaan sehari-hari berada di tangan account officer, analis kredit, petugas operasional, manajemen risiko, hingga fungsi pendukung lainnya.

Nasabah

Dalam penerapan **Keuangan Berkelanjutan**, nasabah bukan hanya penerima Kredit / Pembiayaan, tetapi juga partner yang menentukan dampak nyata dari kegiatan bank terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Apa yang dilakukan nasabah setelah memperoleh kredit pada akhirnya membentuk kualitas portofolio keberlanjutan di BPR Dana Multi Guna.

Lainnya

Asosiasi perbankan/ Perbarindo berperan sebagai wadah koordinasi dan berbagi praktik baik antar BPR. Melalui forum ini bank dapat mengikuti pelatihan bersama, dan menyuarakan kendala kepada regulator.

Umpan Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah sekaligus penerapan evaluasi BPR Dana Multi Guna yang bertujuan meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang, BPR Dana Multi Guna menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir Laporan Keberlanjutan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

BPR Dana Multi Guna memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, dan investor serta siapa saja yang memberikan umpan balik (*feedback*) mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi:

EDWIN YUNARINDA S.

Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko

PT. BPR. Dana Multi Guna

Jl. KH. Dewantara No. 63

Cikarang Utara

Kabupaten Bekasi

Telepon : (021) 890 1415

email : edwinsatya@bprdmg.com

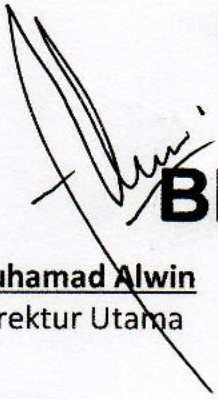
Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 ini merupakan yang pertama kali oleh karenanya belum mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Bank akan terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi segenap pembaca.

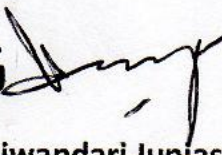
**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025
PT. BPR DANA MULTI GUNA**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2025 telah disusun sesuai dengan POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kab. Bekasi, 27 April 2026
PT. BPR Dana Multi Guna


Muhamad Alwin
Direktur Utama


Riwandari Juniasti
Komisaris Utama

LAPORAN DEMOGRAFI PEGAWAI
PT. BPR Dana Multi Guna
TAHUN 2025

1. Demografi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

No	Level Organisasi	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
	Jumlah	18	6	24	100%

2. Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
	S1	5	5	10	41.67%
	D3	1	1	2	8.33%
	SMA	12	0	12	50.00%
	Jumlah			24	100.00%

3. Demografi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
	Tetap	9	4	13	54.17%
	Kontrak	9	2	11	45.83%
	Jumlah			24	100%

4. Demografi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

No	Rentang Usia	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
	<=25	1	0	1	4.17%
	>25-35	6	3	9	37.50%
	>35-45	4	0	4	16.67%
	>45-55	7	1	8	33.33%
	>55	0	2	2	8.33%
	Jumlah			24	100%

5. Demografi Pegawai Berdasarkan Generasi

No	Generasi	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
	1965-1980	7	3	10	41.67%
	1981-1996	7	0	7	29.17%
	1997-2003	4	3	7	29.17%
	Jumlah			24	100%